

Pengembangan Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama: Implementasi Sistem *Panngaderreng* Di Kota Parepare

Abdul Halik¹, Djamaluddin M. Idris², Suredah Hamid³

^{1,2,3}Jurusan Tarbiyah, Program Studi PAI, STAIN Parepare
Parepare, Indonesia

¹abdulhaliknas@gmail.com, ²Djamaluddin.idris@gmail.com

Abstrak - Permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kemajuan dalam bidang SARA, kearifan lokal *panngaderreng* dapat diterima oleh masyarakat majemuk, melembagakan kearifan lokal *panngaderreng* agar dapat terlestarikan budaya lokal Bugis, dan kearifan lokal *panngaderreng* dapat memberikan kontribusi kepada kualitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare. Tujuan kajian ini adalah terciptanya kerukunan dan toleransi beragama yang didasari kepada kearifan lokal, tumbuhnya kesadaran akan kecintaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap rukun dan toleran di tengah kemajemukan, terlembaganya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai inspirasi dan motivasi merawat kerukunan dan toleransi, terbangunnya keterikatan masyarakat majemuk terhadap nilai-nilai *panngaderreng* agar kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dan kearifan lokal *panngaderreng* sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, triangulasi, dan FGD. Teknik analisis data adalah reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil kajian ini adalah masyarakat Parepare menghargai perbedaan, toleransi dan kerukunan umat beragama berbasis budaya lokal *panngaderreng*, nilai *panngaderreng* bersifat inklusif, humanis, dan universal; pentingnya legitimasi institusi *panngaderreng* dari pemerintah dan masyarakat serta bermitra dengan aparat hukum dan keamanan serta organisasi keagamaan dan kepemudaan; dan *panngaderreng* sebagai wadah

edukatif dan preventif, serta menjadi mediator dengan pendekatan kekeluargaan dan kebudayaan.

Kata kunci: *Toleransi, Kemajemukan, Institusi, Panngaderreng, legitimasi.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam, yang terdiri atas ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Diurai lebih terperinci bangsa Indonesia mempunyai talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda¹.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2013 adalah sebanyak 248.818.000 jiwa, yang terdiri atas 125.036.000 penduduk laki-laki dan 123.782.000 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki². Pada sensus tahun 2010, *religious demography* di Indonesia menunjukkan 237.641.326 juta jiwa penganut agama yang berbeda dengan komposisi 87,2% pemeluk Islam, 7% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,71% Buddha, Khonghucu (0.04%), dan lainnva (0.10%)³.

Pluralitas agama merupakan realitas sosial dalam kehidupan. Adanya pluralitas atau kemajemukan sebenarnya merupakan suatu rahmat yang patut untuk disyukuri⁴. Keanekaragaman ini merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya⁵. Dari sisi agama, di Indonesia hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Setiap agama dapat hidup berdampingan dan penuh toleransi. Setiap agama dijamin bebas mengaktualisasikan keyakinan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

Kemajemukan merupakan tantangan bagi umat beragama sendiri karena dalam kemajemukan biasanya sarat dengan kepentingan yang sering populer disebut *conflict interest*⁶. Alwi Shihab menyatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan adanya kemajemukan, namun yang terpenting adalah keterlibatan aktif menyikapi fakta pluralitas itu. Dengan kata lain, pluralisme agama berarti setiap pemeluk agama dituntut tidak hanya mengekui keberadaan dan hak agama orang lain, tetapi turut serta dalam usaha memahami perbedaan ajaran masing-masing dan persamaan kedudukan pemeluknya dalam pergaulan kehidupan di masyarakat demi tercapainya kerukunan dalam kebhinnekaan⁷.

Kota Parepare adalah kota heterogen dan masyarakatnya rukun dan harmonis, yaitu agama Islam (agama mayoritas) dengan jumlah 111.484 pemeluk (86,70%), agama Buddha dengan jumlah 1.398 pemeluk (1,09%), Katolik serta Kristen Protestan masing-masing 5.243 (4,08%) dan 8.104 pemeluk (6,30%), agama Hindu sebanyak 1.826 (1,42%), dan Konghuchu 534 pemeluk (0,42%), akan tetapi dalam kehidupan sosialnya tetap berdampingan sejak lama tanpa terjadi konflik sampai saat ini. Kemajemukan agama menjadi bagian kehidupan masyarakat Parepare yang terbangun sejak lama, dan menjadi jati diri dalam pembangunan.

Masyarakat Parepare adalah mayoritas Bugis dan berkisar 80% dari populasi penduduk. Parepare merupakan wilayah kebudayaan Bugis sehingga pentingnya aktualisasi dan merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal dalam

menjaga kehidupan yang rukun dan toleran. Nilai-nilai kearifan lokal yang urgen 'dihidupkan' kembali adalah *panngaderreng*. Peran *panngaderreng* yang terpenting adalah peranan aktifnya sebagai pengontrol kehidupan masyarakat, yang meliputi masalah kebebasan manusia, hak dan kewajiban manusia, tanggung jawab seorang pemimpin, dan seterusnya. *Pangngaderreng* telah merupakan jiwa dan semangat manusia Bugis berlaku umum dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. *Pangngaderreng* telah manunggal dalam kehidupan itu tidak mengenal perbedaan kedudukan, kelas sosial, derajat kepangkatan, status sosial ekonomi, dan lain-lain dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman adat terhadap manusia-manusia yang telah melakukan pelanggaran⁸.

Sumber lahirnya potensi intoleransi dalam kehidupan plural adalah aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek budaya, politik, dan sebagainya. Terjadinya kesenjangan sosial yang signifikan, partisipasi pendidikan yang rendah, budaya yang tereduksi oleh globalisasi materialisme dan hedonisme, politik diskriminasi, dan lain-lain. Urgensi dan relevansi penelitian ini memberikan solusi terhadap tindakan preventif dan kuratif adalah reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai sistem hidup yang dapat mengayomi seluruh komponen dan latar belakang masyarakat adalah sistem *panngaderreng*. Sistem *panngaderreng* agar lebih fungsional di masyarakat jika direformulasi menjadi sebuah institusi yang *legitimated*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang berkembang dan urgen mendapatkan solusi dalam makalah ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap kemajuan dalam bidang Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) di Kota Parepare? Bagaimana kearifan lokal *panngaderreng* dapat diterima oleh masyarakat majemuk di Kota Parepare? Bagaimana melembagakan kearifan lokal *panngaderreng* agar dapat lestari budaya lokal Bugis di Kota Parepare? Bagaimana kearifan

lokal *panngaderreng* dapat memberikan kontribusi kepada kualitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Terciptanya kerukunan dan toleransi beragama yang didasari kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal; Tumbuhnya kesadaran akan kecintaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap rukun dan toleran di tengah kemajemukan di Kota Parepare; Terlembaganya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai inspirasi dan motivasi merawat kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare; Terbangunnya keterikatan masyarakat majemuk terhadap nilai-nilai *panngaderreng* agar kerukunan dan toleransi antar umat beragama dapat lestari di Kota Parepare; Terbentuknya institusi kearifan lokal *panngaderreng* sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

Manfaat penelitian yaitu Terlestarikannya nilai-nilai *panngaderreng* sebagai kearifan lokal di Kota Parepare yang mayoritas bersuku Bugis; Mengembalikan tatanan kearifan lokal *panngaderreng* sebagai filosofi dan dasar hidup masyarakat Kota Parepare yang telah terbukti mampu menciptakan rasa aman dan kesatuan di dalam masyarakat Bugis; Terbentuknya institusi *parewa ade'* (penjaga adat) *panngaderreng* yang mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare; Terbantunya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

D. Kajian Pustaka/Teoretis

1. Pola Kerukunan umat beragama

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan

forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat, dinyatakan bahwa:

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada "klaim kebenaran" dari pada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya¹⁰.

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas¹¹. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan suasana kreatif. Kualitas kerukunan hidup umat bergama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat.

Kondisi kehidupan beragama sekarang ini, konflik antar umat beragama, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan doktrin yang tidak dapat dihindari tidak akan berpotensi menjadi konflik apabila umat beragama dalam suatu masyarakat berjiwa toleran dan menghargai doktrin dan ajaran agama yang berlainan dengan agamanya. Pendidikan umat sejak dini melalui penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan dalam suatu proses yang dimulai dengan pemberian dasar pengetahuan agama dilanjutkan dengan pelaksanaan agama dan terciptanya fungsi agama¹².

Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif personal oleh setiap pemeluk agama. Tampaknya, setiap orang memang sulit melepaskan kerangka (*frame*) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun alamiah, namun setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya. Oleh sebab itu, setiap penganut agama tidak harus memaksakan inklusivismenya pada orang lain, yang menurut kita eksklusif.

Membangun kerukunan umat beragama adalah suatu kemestian. Menuju kepada kebenaran adalah ciri dari masing-masing agama. Sepanjang itu terbentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama setiap orang tidak sewajarnya berfikir untuk memutlakkan pendapat. Sepantasnya masing-masing penganut agama rela hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun masyarakat¹³.

2. Toleransi antar umat beragama

Sullivan, Pierson, dan Marcus, dalam Saiful Mujani¹⁴, toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to "put up with" those things one rejects or opposes*, yakni "kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang". J.P. Chaplin¹⁵ menyatakan, toleransi adalah satu sikap liberalis, atau tidak mau campur tangan dan tidak mau campur tangan dan tidak mengganggu tingkah

laku dan keyakinan orang lain. Lorens Bagus menjelaskan, toleransi adalah sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Dengan sikap itu ia juga tidak mencoba memberangus ungkapan-ungkapan yang sah keyakinan-keyakinan orang lain tersebut.

Dengan menggunakan perspektif psikologi sosial, Yahya Khisbiyah¹⁶ menjelaskan, toleransi adalah kemampuan untuk menahankan hal-hal yang tidak kita setuju atau tidak kita sukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang/kelompok lain yang berbeda dengan kita. Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleran, muncul karena kita tidak bisa atau tidak mau menerima dan menghargai perbedaan. Intoleransi bisa terjadi pada tataran hubungan interpersonal, seperti hubungan antara kakak dan adik, orangtua dan anak, suami dan isteri, antar teman, atau antar kelompok, misalnya suku, agama, bangsa, dan ideologi.

Setiap pemeluk agama hendaknya dapat menghayati ajaran agamanya secara mendalam. Djohan Effendi¹⁷, menyatakan penghayatan terhadap aspek kedalaman dari agama akan dapat membuat seseorang lebih mampu bersikap menghormati orang lain secara lebih manusiawi. Dengan kata lain, aspek kedalaman dari agama itulah yang membuat seseorang lebih toleran terhadap orang lain. Hal ini membuat seseorang pada aspek kedalaman dari agama terdapat titik-titik temu yang lebih banyak dari agama-agama.

Meskipun demikian dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, menurut Anwar Harjono¹⁸, ada dua hal yang sama besar bahayanya, yaitu: Pertama, apabila kita hanya terpaku kepada tugas-tugas dalam lingkungan agama kita sendiri tanpa menghiraukan hak-hak golongan agama lain. Kedua, apabila kita terlalu bersemangat menjalankan toleransi sehingga kita menganggap semua agama sama saja, sama benarnya, atau sama salahnya.

Masykuri Abdullah¹⁹ menilai toleransi mempunyai dua unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain, yaitu: (1) Memberikan kebebasan atau kemerdekaan, dan (2) Menghormati prinsip dan hak orang lain. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia, baik di dalam Undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu juga, menghormati hak orang lain maka akan mudah dalam menciptakan hubungan toleransi dengan orang lain.

Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati serta menghargai eksistensi agama lain²⁰. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan merupakan tindakan toleransi yang kuat dalam mewujudkan kerukunan. Kesadaran bersama dalam hidup di tengah pluralitas, menjadi prasyarat interaksi satu sama lain terjalin dengan baik, tentram, dan aman. Karena, isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik²¹.

3. Nilai *Pangaderreng* dan institusi kearifan lokal

Kearifan lokal yang mendasar dalam budaya Bugis adalah *Pangaderreng*. Konsep *pangaderreng* menjadi filosofi hidup masyarakat Bugis dan dijadikan instrument dalam membangun pranata social di tengah heterogenitas. *Pangaderreng* dapat diartikan seluruh norma yang mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamika masyarakat²². Konsep *Pangaderreng* mempunyai pengertian yang lebih luas dari adat, yaitu tidak hanya meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma atau aturan-aturan adat yang mengandung nilai-nilai normatif, tetapi juga meliputi hal-hal dimana seorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan social, bukan hanya harus melakukannya, tetapi ia harus pula melarutkan

perasaan bahwa seseorang itu bagian internal dari *pangaderreng*²³.

Hakikat *Pangaderreng* ditunjang oleh beberapa unsur, yaitu: (a) *Ade'* atau adat; (b) *Rapang* atau undang-undang; (c) *Wari* atau aturan pangkat kebangsaan; (d) *Bicara* atau ucapan, bicara; dan (e) *Syara'* atau ajaran Islam²⁴. *Ade'* berkaitan dengan hubungan kekerabatan, norma-norma mengenai Negara dan perkawinan; *bicara* adalah aturan-aturan tentang peradilan; *rapang* berarti contoh, perumpamaan, kias, atau analogi dari masa lampau; *wari'* adalah system klasifikasi segala benda, peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat menurut kategori-kategorinya; *syara'* adalah pranata-pranata dan hukum Islam²⁵.

Beberapa aturan sopan santun dalam orang Bugis yang dinampakkan dalam gerak sikap dan tutur bahasa mereka, yaitu: (a) pada pertemuan-pertemuan, tidak boleh ikut bersuara kalau tidak ditanya; (b) Menghindari lewat di depan orang, kalau terpaksa harus lewat dengan membungkukkan diri, mengayung tangan kanan ke depan dengan mengucapkan kata *tabek*; (c) Duduk di hadapan orang yang dihormati harus bersila (*massulekka lebba*); (d) Seorang lelaki kalau makan harus memakai penutup kepala (*songkok*) dan memakai sarung (*bidak*); (e) Bila kedatangan tamu harus menerimanya dengan pakaian rapih; (f) Bila makan bersama orang yang dihormati, tidak boleh mendahului selesai makan; (g) Perempuan tidak boleh tidur telentang yang disebut *matinro monrang-monrang*; (h) Seorang lelaki tidak boleh bertamu di rumah seseorang, kalau di dalam rumah itu tidak ada yang lelaki; (i) Seorang perempuan tidak boleh sendiri, baik di rumah terlebih-lebih kalau bepergian; (j) Seorang perempuan tidak boleh mengadakan pertemuan atau pembicaraan hanya berdua dengan lelaki; dan (k) Seorang perempuan tidak boleh berlaku keras memperdengarkan suara atau ketawanya²⁶.

Matulada²⁷ menyatakan bahwa ada empat azas yang terkandung dalam *pangaderreng*, yaitu: (a) Azas *mappasilasa'e*, yaitu manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku dalam memperlakukan dirinya; (b) Azas

Mappasisaue, diwujudkan untuk menimpakan deraan pada tiap-tiap pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam *bicara*. Azas ini dilengkapi dengan *siariwawong* yang diwujudkan untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah; (c) Azas *Mappasenrupae* diwujudkan untuk memelihara kontinuitas pola yang sudah ada lebih dahulu guna stabilisasi perkembangan-perkembangan yang muncul; dan (e) Azas *Mappallaisêng* diwujudkan untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga sosialnya sehingga masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, *chaos* dan lain-lain.

Transformasi masyarakat menuju modernisasi, pemaknaan *panngaderreng* dapat dilakukan secara tekstual, apalagi berkaitan pola interaksi dengan masyarakat heterogen. Kecuali *syara'*, unsur-unsur *panngaderreng* tersebut kini mengalami degradasi antara lain disebabkan oleh hilangnya lembaga pengawasan dan pembinaan *ade'* dalam masyarakat Bugis yang biasanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat adat, seperti *pakkatenni ade'* atau *parewa ade'*. Hal ini berlangsung bersamaan dengan menurunnya rasa malu atau *siri'* di dalam masyarakat²⁸. Orang Bugis menyamakan manusia dengan *siri'*, yaitu *siri' emmi nariaseng tau*, hanya karena adanya *siri'* maka kita dinamakan manusia. Orang yang tidak memiliki *siri'* disebut *olok-olok* (binatang)²⁹.

Hal tersebut dinilai sangat penting diaktualisasikan kembali pijakan yang kuat dalam membangun pranata sosial masyarakat Bugis yang heterogen di Kota Parepare. Institusionalisasi sistem *panngaderreng* menjadi sangat urgen dilakukan agar identitas dan nilai kearifan lokal tidak tereduksi oleh dinamika zaman. Konsep institusi *panngaderreng* menjadi pelestari budaya dan pijakan masyarakat dalam menata pola interaksi sosial dalam mengembangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Parepare.

II. METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan³⁰. Penelitian kualitatif mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris—studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual—yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang³¹.

B. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang mengamati tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dimana para peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari³². Kemudian, pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah (a) Pendekatan teologis, (b) Pendekatan antropologis, dan (c) Pendekatan sosiologis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu: (a) Observasi partisipasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan dan melihat fenomena kerukunan dan toleransi antar beragama serta pentingnya pendirian institusi kearifan lokal *panngaderreng* sebagai wadah dan instrumen menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama tersebut; (b) Wawancara mendalam (*in dept interview*), yaitu wawancara mendalam dengan pihak terkait tentang kondisi ril dan masa depan kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta pendirian institusi kearifan lokal *panngaderreng*; (c) Dokumentasi yaitu studi teks-teks toleransi dan kerukunan antar beragama yang

sudah terbangun selama ini di Kota Parepare, termasuk MoU dan resolusi yang dikembangkan; (d) Data dari konklusi pertemuan antar berbagai unsur, *brainstorming*, lokakarya, dan *focus group discussion*; dan (e) Triangulasi data, yaitu mempertemukan data dari berbagai sumber dan berbagai metode.

D. Teknik Analisis Data

Penerapan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip Sugiyono, dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang merupakan satu kesatuan (saling berkaitan), yaitu: (1) reduksi kata; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi³³. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan strukturalisme fungsional. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya terutama norma, adat, tradisi, dan institusi³⁴. Hal ini setiap elemen saling berhubungan dan saling ketergantungan menuju keseimbangan. Elemen penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama, norma, dan institusi yang saling berhubungan satu sama lain

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Hasil Penelitian

Toleransi sangat penting dalam hubungan bermasyarakat, etika bersosialisasi sangat menentukan seseorang dapat diterima atau tidak. Adanya sikap toleransi pada masyarakat dengan latar belakang beragam mampu saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Toleransi harus ditegakkan sebagai keyakinan pokok (akidah) dalam beragama. Makna pengamalan toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi dan kelompok yang selalu dihabitualisasikan dalam wujud interaksi sosial. Toleran maknanya, bersikap menghargai, membiarkan pendirian, pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain, yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Indikator sebagai bukti terbangunnya toleransi dan kerukunan yakni adanya kesepakatan tidak tertulis dari masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan agama dan budaya sebagai sumber perpecahan. Kesepakatan ini dapat diketahui dari informasi yang disampaikan oleh beberapa informan. Umumnya informan mengomentari bahwa masyarakat telah memiliki komitmen yang sama dan kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mempersoalkan perbedaan yang ada.

Parepare adalah masyarakat majemuk dan menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga perbedaan tersebut dan hidup dalam hidup rukun dan toleran. Pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan³⁵.

Masyarakat Parepare sangat menyadari keberagaman dan pentingnya menjaga dan merawat sikap toleransi dan kerukunan umat beragama. Sekertaris Badan Pekerja Majelis Gereja menyatakan bahwa “dalam hubungan sosial kemasyarakatan, banyak potensi yang dapat menghadirkan konflik, di antaranya perbedaan pendapat, cara pandang, agama. Namun, konflik yang akan terjadi memberikan kurang nyamannya melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan hanya memberikan perpecahan. Meskipun dalam berbagai hubungan tersebut dapat menimbulkan perbedaan dan konflik, akan tetapi masalah tersebut tidak dibiarkan hingga melibatkan berbagai kelompok dan elit masyarakat, akan tetapi diselesaikan dengan damai³⁶.”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat ditegaskan bahwa Pola kerukunan yang bersifat aktif pada masyarakat Kota Parepare terjadi pada berbagai aspek kehidupan: pertama aspek keseharian di dalam bergaul warga tidak membedakan agama yang dianutnya, semua masyarakat Kota Parepare adalah sahabat dan akan memperkuat dan mempermudah proses-proses pembangunan. Berbagai macam grup kesenian yang ada turut mempermudah proses

kemasyarakatan yang dijalin oleh umat yang berbeda agama ini. Kedua aspek sosial, pada aspek ini masyarakat Kota Parepare saling bahu membahu dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong-royong dan perbaikan rumah.

Interaksi yang terjadi sangat bagus, kita sering komonikasi, kita bisa hidup bersama terkadang juga kita saling menolong, mengunjungi saling membantu kalau membutuhkan. Mengenai tentang perayaan dihari perayaan Islam terkadang kita siarah kerumahannya, kalau acara syukuran keluarga masih bisa menghadiri dan kita saling mengundang walaupun tanpa harus mengikuti ibadahnya³⁷.

Rasa hormat menimbulkan rasa hormat pula. Jika kita mengharap pemeluk agama lain menghormati ibadah agama kita, maka pada gilirannya kita juga tidak boleh ragu-ragu untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka pada saat mereka melakukan ibadah mereka. Sikap ini pasti akan mendukung hubungan yang lancar dan ramah dalam suatu masyarakat yang menganut berbagai agama masyarakat multi religius³⁸.

Tanpa melaksanakan semangat toleransi dan saling menghormati, maka racun diskriminasi, ejekan, dan kebencian yang berbahaya itu akan menyembur menghancurkan kedamaian dan ketentraman masyarakat di Kota Parepare. Suatu kenyataan bahwa di tempat tertentu yang tidak terdapat semangat toleransi dan saling hormat dalam perbedaan, maka pembunuhan, pembakaran dan penghancuran milik yang berharga telah terjadi. Tindakan tak berguna seperti itu, yang menyebabkan hilangnya nyawa yang sangat berharga dan harta benda yang tak dapat ditebus, seharusnya membuka mata semua orang yang mendambakan kehidupan damai dan serasi. Semua umat yang beragama harus bersatu dalam persahabatan dan hubungan baik serta dengan kehendak baik antara satu sama lain guna mencapai harapan semua orang yang cinta damai dalam membangun masyarakat yang serasi, aman dan tentram.

Persepsi masyarakat Parepare terhadap kemajemukan direspon sebagai sebuah keniscayaan, memiliki hikmah dan manfaat, serta

berkontribusi kepada pembangunan. Oleh sebab itu, penting dijaga dan dikembangkan toleransi dan kerukunan dengan pendekatan kearifan lokal. Konsep ini didasarkan pada pola interaksi masyarakat Parepare lebih didasarkan pada budaya lokal, sensitifnya toleransi atas kemajemukan di masyarakat Parepare, berkembangnya media sosial sebagai sarana pemersatu bahkan dapat menjadi pemicu konflik, dukungan pemerintah dan masyarakat (tokoh agama dan adat) untuk menjaga dan merawat toleransi. Mengacu atas konsep tersebut, maka nilai *panngaderreng* sebagai kearifan lokal urgen diinstitusionalisasikan sebagai wadah pemersatu dan pengembangan sikap toleransi dan kerukunan hidup masyarakat.

Salah seorang informan menyatakan bahwa “nilai *panngaderreng* hampir sama dengan budaya masyarakat lainnya di luar Bugis. Prinsip hidup di dalamnya sangat manusiawi dan rasional, dan dapat bertindak tegas kepada warga yang tidak patuh kepada hukum sosial yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, penting dijaga dan dilembagakan nilai *panngaderreng* tersebut agar toleransi dapat berkembang lebih kreatif dan inovatif³⁹. Keterangan tersebut menegaskan bahwa Parepare mayoritas suku Bugis dan budaya Bugis dapat diterima oleh masyarakat, buktinya hampir masyarakat non-Bugis bisa paham bahasa Bugis dan berinteraksi sosial yang sesuai dengan karakter budaya Bugis.

Masyarakat Bugis di Kota Parepare sangat memahami nilai-nilai *panngaderreng*, namun penting diaktualisasikan secara terlembaga agar tidak tereduksi oleh dinamika zaman. Informan menyatakan bahwa “nilai *panngaderreng* sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman, dan yang tetap bertahan adalah aspek *syara*’. Aspek *syara*’ merupakan pengakuan atas doktrin Islam sebagai bagian dari budaya Bugis yang masih berjalan sampai sekarang. Oleh sebab itu, nilai *panngaderreng* harus dipertahankan sebagai khazanah budaya lokal melalui pelembagaan di masyarakat⁴⁰. Statemen tersebut mengisyaratkan bahwa *panngaderreng* penting dijaga sebagai

perekat dan pemersatu di dalam masyarakat, sehingga harus dilembagakan.

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa masyarakat Parepare tampak menghargai dan menghormati budaya lokal terutama budaya Bugis sebagai budaya pribumi. Masyarakat yang berasal dari budaya di luar Bugis, seperti Mandar, Makassar, Jawa, Toraja, Cina, dan lainnya melebur ke dalam budaya Bugis dengan pola interaksi yang harmonis. Rata-rata masyarakat Non-Bugis paham prinsip hidup orang Bugis, tradisi, adat-istiadat, norma, dan seterusnya. Dengan demikian, sosialisasi dan implementasi kearifan lokal *panngaderreng* pada level institusi tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

Panngaderreng merupakan sistem sosial budaya bugis yang di dalamnya ada unsur, a) *Ade'* atau adat; (b) *Rapang* atau undang-undang; (c) *Wari* atau aturan pangkat kebangsaan; (d) *Bicara* atau ucapan, bicara; dan (e) *Syara'* atau ajaran Islam. Unsur *panngaderreng* urgen direinterpretasikan sesuai dengan era kekinian sehingga efektif diaktualisasikan dalam lingkungan masyarakat. Terlembaganya kembali sistem sosial tersebut, diyakini kerukunan dan toleransi pada masyarakat Parepare dapat terjalin dengan baik dan fondasi yang kuat.

Informan berpandangan bahwa: "sebaiknya *panngaderreng* dilembagakan dalam struktur sosial masyarakat di Parepare, yang mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat yang kewenangannya pelindung adat dan pembina masyarakat agar rukun serta menjadi 'corong' pengembangan toleransi dan kerukunan. Institusi *panngaderreng* terdiri atas unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh lintas agama, dan wakil masing-masing dari suku"⁴¹. Keterangan tersebut mendeskripsikan pentingnya wadah *panngaderreng* menjadi perekat persatuan dan kebersamaan dalam merawat order sosial yang berkeadaban.

Hasil diskusi dalam forum informal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa lembaga *panngaderreng* akan menjadi efektif jika di bawah koordinasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Lembaga tersebut

mewadahi komunikasi lintas agama dan komunitas kedaerahan. Posisi struktural *panngaderreng* bersifat independen dan Tupoksinya adalah mensosialisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang berbasis kearifan lokal, strategi merawat dan mengembangkan toleransi, dan membina masyarakat agar saling menghargai dan menghormati.

Jika terdapat konflik karena miskomunikasi pada aspek keagamaan, aspek budaya, atau aspek karakter atau moralitas, maka institusi *panngaderreng* dapat melakukan tugasnya untuk memediasi dan sekaligus memberikan pencerahan kedua belah pihak. Tindakan edukatif dan preventif menjadi tugas utama institusi *panngaderreng* dalam mengawal harmoni kehidupan sosial di tengah kemajemukan. Namun demikian, institusi *panngaderreng* tetap berwawasan nasional dengan mengacu kepada ideologi negara (Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945) sehingga linear dengan tujuan pembangunan bangsa.

Sistem *panngaderreng* jika diterapkan di tengah masyarakat Bugis yang majemuk, dengan institusi yang kuat, mendapat legitimasi dari pemerintah dan masyarakat, jelas batas kewenangan, berfungsi dalam memberikan edukasi dan preventif terhadap masyarakat, serta membangun kemitraan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk TNI dan Kepolisian, maka masyarakat Parepare sadar akan posisinya masing-masing, saling menghormati dan menghargai atas perbedaan, bekerjasama untuk kepentingan umum, serta menjaga kelestarian harmoni dalam masyarakat.

2. Pembahasan

Toleransi dan kerukunan sosial di tengah kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan. Parepare merupakan daerah yang masyarakatnya majemuk dan mayoritas bersuku Bugis dan beragama Islam. Kemajemukan berpotensi konflik jika berbenturan dengan kepentingan, tetapi menjadi 'berkah' jika dapat dikelola dengan baik. Realitas interaksi sosial masyarakat Parepare didominasi oleh basis budaya lokal, sehingga

penting diaktualisasikan prinsip dan sistem sosial berbasis kearifan lokal. Berakarnya kearifan lokal dalam sektor interaksi sosial, dapat berimplikasi pada kreativitas toleransi dan kerukunan masyarakat yang bersifat jangka panjang.

Institusionalisasi *panngaderreng* di Kota Parepare merupakan solusi alternatif bagi pelestarian dan pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bukan berarti mereduksi doktrin agama dan budaya lain, tetapi justru semakin terjaga di tengah dinamika global yang terobjektivitas dan terasionalisasi. Penguatan institusi *panngaderreng* akan ikut menjaga keyakinan antar umat beragama agar masing-masing mendapat ruang berkreasi dan berinovasi mengembangkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Hal tersebut disebabkan karena nilai budaya Bugis bersifat inklusif, universal, humanis, dan rasional.

Nilai-nilai Bugis merupakan manifestasi dari perwujudan nilai-nilai *panngaderreng* yang dapat bergerak maju melalui institusionalisasi di pada masyarakat di Kota Parepare. Nilai budaya Bugis yang diwariskan, yaitu: *alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiaan), *asitinajang* (kepatutan), *agettingang* (keteguhan), *reso* (usaha), *siri'* (harga diri)⁴².

1. *Alempureng* (kejujuran)

Kata *alempureng* berasal dari kata *lempu* yang berarti jujur, lurus. Rahman Rahim⁴³ menyatakan bahwa *lempu* kadangkala diartikan ikhlas, benar, baik atau adil, sedangkan lawannya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Konteks sosial sikap *alempureng* yakni keikhlasan menerima perbedaan, memperlakukan dengan baik, dan berani menyatakan yang benar serta tegas terhadap kebenaran.

2. *Amaccang* (kecendekiaan)

Kata *amaccang* berasal dari kata *acca* yang berarti cendekia atau intelek. Nilai kecendekiawanan sering diungkapkan secara beriringan dengan kejujuran atau *lempu'*. Sikap *acca* dapat dimiliki oleh orang memiliki sikap *lempu'* dan begitu sebaliknya. Pesan-pesan yang terdapat dalam lontarak Bugis, disebutkan bahwa:

*Ajak nasalaiko acca sibawa lempu', naiya riasengnge acca dekgaga masussa napogau ada masussa na bali ada madereng malemmae; mateppek-i ripadanna tau. Naiya riasengnge lempu, makessinggi gaukna, patujui nawanawanna madereng, namatau ri Dewata-e.*⁴⁴

(Jangan kamu tidak memiliki kecendekiawanan dan kejujuran. Adapun yang dinamakan cendekia adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur adalah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kecerdasan (*amaccang*) ini mendorong masyarakat untuk berjiwa arif dan bijaksana, membangun kemandirian, serta mampu memberikan solusi atas masalah-masalah sosial. Sikap *amaccang* menjadi sempurna apabila dibackup oleh sikap *alempureng*.

3. *Asitinajang* (kepatutan)

Asitinajang (kepatutan) adalah *poutudangi tudanmu, puonroi onrommu* (duduki kedudukanmu, tempati tempatmu)⁴⁵. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak dibiasakan memberi (*mabbere*), jangan kikir (*masekke*), menghargai orang tua (*napakaraja tomatuwae*), dan sesama anak-anak (*padapadannya ananak*). Hal ini dilakukan sejak kecil agar dapat terbentuk karakter yang diharapkan, sebagaimana dalam pesan Bugis *lele bulu, tellele abiasang* (gunung berpindah, kebiasaan tidak dapat berpindah)⁴⁶.

4. *Agettingang* (keteguhan)

Agettingang merupakan nilai utama budaya Bugis yang membangun solidaritas dan toleransi pada masyarakat. Dalam Lontarak Bugis disebutkan:

*Eppa'i gaukna gettengnge, tessalai janci, tessorosie ulu ada tellka annu teppinra assiturung, mabbicarai naparapi, mabbinnui tipupo napaja*⁴⁷.

(empat perbuatan nilai keteguhan, yaitu tak mengingkari janji, tak menghinai kesepakatan, tak membatalkan keputusan, dan

tak mengubah kesepakatan, serta jika berbica dan berbuat tak akan berhenti sebelum rampung).

Sikap *agettengang* merupakan nilai prinsip dalam budaya Bugis yang termanifestasi ke dalam *panngaderreng*. Generasi yang terbentuk sikap *agettengang* akan membentuk kepribadian yang kuat, fleksibel, santun, dan tegas. Konteks ini dapat memberikan jaminan langgengnya solidaritas dan kerukunan sosial karena diikat oleh kesepakatan social.

5. Reso (usaha)

Reso merupakan nilai kunci pelaksanaan nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan dan keteguhan dalam masyarakat Bugis pada umumnya. Ungkapan Bugis: *Resopa temmangingngi namalomo naletei pammase dewata* (hanya dengan usaha yang tak mengenal lelah memudahkan untuk mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa). Rahim menyatakan nilai-nilai Bugis dapat berperanan secara tepat guna apabila didukung oleh usaha (*reso*)⁴⁸. Reso dapat dimaknai sebagai ikhtiar menjaga kebersamaan dan menciptakan tatanan social yang toleran, rukun, dan harmoni.

6. Siri' (harga diri)

Siri' adalah harga diri, yang dapat disinonimkan "manusia susila". Hal tersebut senada dalam ungkapan Bugis: *iyanatu siri'e riaseng tau*⁴⁹ (harga dirilah yang menyebabkan manusia disebut manusia). Nilai budaya *siri'* sangat penting diwariskan kepada keturunan atau anak-anak. Karena memegang teguh nilai *siri'* maka eksistensinya sebagai manusia mendapat kehormatan, sebaliknya mengabaikan nilai *siri'* akan mendapat hinaan atau dijauhkan bahkan menjadi sampah masyarakat⁵⁰.

Basis sistem *panngaderreng* adalah keenam nilai budaya Bugis di atas, jika dimaknai bersifat universal dan humanis. Pendekatan filosofis dari nilai budaya Bugis tersebut menjadi titik temu kemajemukan dan penerimaan nilai-nilai kearifan lokal di tengah masyarakat Kota Parepare.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Masyarakat Parepare memahami dan menyadari tentang kemajemukan di bidang SARA. Perspepsi masyarakat bahwa kemajemukan adalah sebuah keniscayaan (*sunnatullah*) dan selalu ada hikmahnya, sehingga tugas masyarakat menjaga kemajemukan melalui sikap toleran dan rukun. Membangun toleransi dan kerukunan di Kota Parepare dilakukan melalui pendekatan budaya.
2. Kearifan lokal *panngaderreng* mudah diterima masyarakat Kota Parepare karena pola interaksi sosial berbasis budaya lokal. Nilai-nilai budaya Bugis bersifat inklusif, humanis, dan universal, sehingga masyarakat plural mudah menerima karena tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masing-masing.
3. Institusi *panngaderreng* menjadi wadah perekat kebersamaan dalam kemajemukan. Institusi ini di bawah koordinasi pemerintah dan mendapat legitimasi dari masyarakat. Institusi *panngaderreng* bekerja sama dengan tokoh masyarakat lintas agama dan budaya, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dan kepemudaan.
4. Institusi *panngaderreng* bersikap independen dan melakukan tugas pokok sebagai wadah edukatif dan preventif. Melakukan mediasi dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan potensi konflik pada aspek keagamaan, budaya, dan moralitas. Institusi *panngaderreng* selalu melakukan dialog dan diskusi tentang kreativitas dan inovasi pengembangan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ¹Rahab, Amiruddin al-. “Kekerasan Komunal di Indonesia; Sebuah Tinjauan Umum”. *Jurnal Dignitas*, Vol. V, No. 1, 2008, h. 34.
- [2] ²Badan Pusat Statistik, “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)
- [3] ³Badan Pusat Statistik, “Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> (20 Juni 2014)
- [4] ⁴Yewangoe, A.A. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2002, h. 22.
- [5] ⁵Shihab, Alwi. *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998, h. 335.
- [6] ⁶Jeergenmeyer, Mark. *Menentang Negara Sekuler, Kebangkitan Global Nasional*. Bandung: Mizan, 1998, h. 185.
- [7] ⁷Chamim, Asyuri ibn. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan, 2002, h. 238.
- [8] ⁸Baki, Nasir. “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan”, *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 53.
- [9] ⁹PB. Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006.
- [10] ¹⁰Muhaimin AG. *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2004, h. 19.
- [11] ¹¹Lubis, Ridwan. *Cetak Biru Peran Agama*. Jakarta: Puslitbang, 2005, h.12-13.
- [12] ¹²Mawardi, “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan Sosial”, *Substantia*, Vol. 17, No. 1, April 2015, h. 64.
- [13] ¹³Muhdina, Darwis. “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015, h. 34.
- [14] ¹⁴Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 162.
- [15] ¹⁵Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 512.
- [16] ¹⁶Khisbiyah, Yayah. *Menepis Prasangka, Memupuk Toleransi untuk Multi-Kulturalisme: Dukungan dari Psikologi Sosial*. Surakarta: PSB-PS UMS, 2007, h. 4.
- [17] ¹⁷Effendi, Djohan. “Persahabatan Lebih Penting Daripada Kesepakatan Formal”, *Mimbar Ulama*. No. 128 Tahun XII/1988, h. 29.
- [18] ¹⁸Harjono, Anwar. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 153.
- [19] ¹⁹Masykuri Abdullah. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Penerbit: Kompas, 2001, h. 202.
- [20] ²⁰Ruslani, *Masyarakat Dialog antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000, h. 169.
- [21] ²¹Hermawati, Rina, “Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung”, *Umbara: Indonesian Journal Of Antropology*, Vol. 1 (2) Desember 2016, h. 122.
- [22] ²²Lathief, Halilintar. *Kepercayaan Asli Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Budaya*. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2005, h, 36.
- [23] ²³Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985, h. 306.
- [24] ²⁴Hamid, Abdullah. *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Budaya Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985, h. 49.
- [25] ²⁵Ahmad, Abdul Karim. “Ulama Bugis dalam Dinamika Sosial di Sulawesi Selatan”, *Disertasi*, PPs. Unhas, 2005, h. 22.
- [26] ²⁶Lathief, Halilintar. *Kepercayaan Asli Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi Budaya*. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2005, h. 39.
- [27] ²⁷Sairah Z., Abdul Rokhmat. “Etos Kerja Manusia Bugis-Makassar Sebagai Kritik Terhadap Konsep Kerja dalam Budaya Kapitalisme Barat: Studi Filosofis Atas Persoalan Pengangguran di Indonesia”. *Jurnal Filsafat*, Vo. 21, Nomor 1, April 2011, h. 49-71
- [28] ²⁸Ahmad, Abdul Karim. “Ulama Bugis dalam Dinamika Sosial di Sulawesi Selatan”, *Disertasi*, PPs. Unhas, 2005, h. 23.
- [29] ²⁹Marzuki, Laica. *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar: Sebuah Filsafat Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995, h. 37-38.
- [30] ³⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009, h. 25.
- [31] ³¹Denzin, Norman K. & Yvonna S.Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Daryatno,

- Badrus Samsul Fata, dan Jhon Rinaldi, *Handbook of Qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 2.
- [32] ³²Jailani, M. Syahrani. "Ragam Penelitian Qualitative: Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus", *Jurnal Edu-Bio*, Vol. 4 Tahun 2013, h. 41-50.
- [33] ³³Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008, h. 249.
- [34] ³⁴Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1988, h. 7.
- [35] ³⁵Andi Ajarir, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Parepare, *Wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare*, 23 Juli 2017.
- [36] ³⁶Prince, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Gereja, *Wawancara di Kota Parepare*, 24 Juli 2017
- [37] ³⁷Yoseph, Gembala Jamaah, *Wawancara di Kota Parepare*, 15 Juli 2017
- [38] ³⁸Sawaty Lambe, Tokoh Muhammadiyah Kota Parepare, *Wawancara di Kota Parepare*, 24 Juli 2017
- [39] ³⁹Amirta Lambe, Ketua Kerukunan Keluarga Mandar "Saro Mannassa", *Wawancara*, 21 Juli 2017.
- [40] ⁴⁰Fiqri, "Akademisi Kota Parepare", *Wawancara*, Parepare, 20 Juli 2017.
- [41] ⁴¹Musyarif, "Budayawan dan Akademisi Kota Parepare", *Wawancara*, Parepare, 20 Juli 2017.
- [42] ⁴²Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 203.
- [43] ⁴³Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 145.
- [44] ⁴⁴Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 152.
- [45] ⁴⁵Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 153.
- [46] ⁴⁶Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 210)
- [47] ⁴⁷La Side, *Lontarakna Petta Malampek'e Gemmekna: Sulawesi Ri Attang 1611-1696*. Jilid I; Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1971, h. 75.
- [48] ⁴⁸Rahim, H.A. Rahman. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. III; Makassar: Hasanuddin University Press, 1992, h. 165.
- [49] ⁴⁹Tapala, La Side' Daeng. *Pengertian Perkembangan Siri' pada Suku Bugis di dalam Materi dan Kesimpulan Seminar Makalah Siri' di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Panitia Penyelenggara Seminar, Kodak XVIII Sulselra, 1977, h. 71.
- [50] ⁵⁰Baki, Nasir. "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis: Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan", *Disertasi*, PPs. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005, h. 217.